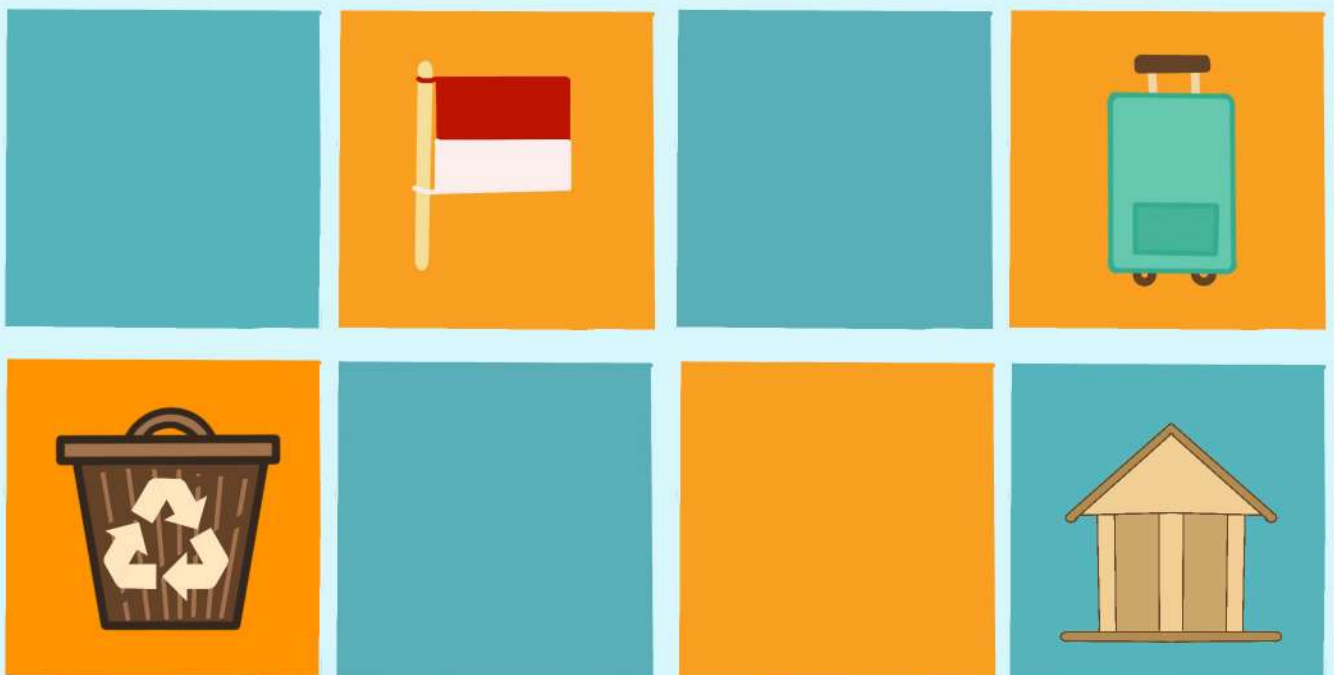




DANA TRANSFER KHUSUS

dalam APBN



Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI

Dana Transfer Khusus Dalam APBN

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Penulis

Rendy Alvaro, S.Sos	Dyah Maysarah, S.Hut.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.	Fadila Puti Lenggo G., S.E., M.M.
Adhi Prasetyo Satriyo W., S.M.	Ricka Wardianingsih, S.E., M.E.
Ade Nurul Aida, S.E.	M. Rizal Firmansyah, S.E., M.Ak.
Tio Riyono, S.E.	

Penyunting

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Ade Nurul Aida, S.E.
Dyah Maysarah, S.Hut.

Desain Sampul

Fadila Puti Lenggo G., S.E., M.M.

Cetakan Pertama, November 2020
ISBN: 978-623-92054-4-7

Diterbitkan oleh:

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh Undang- Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga buku Sekilas Dana Transfer Khusus yang merupakan hasil kerja Tim Penyusun Pusat Kajian Anggaran dapat diterbitkan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk membantu daerah melaksanakan kewenangannya, pemerintah pusat memberikan transfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah, yang salah satunya berupa Dana Transfer Khusus (DTK)

DTK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan UU APBN, penetapan alokasi DTK dalam APBN ditetapkan setiap tahunnya. Untuk melaksanakan ketentuan DTK dalam UU APBN, diterbitkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus. Disamping itu juga diterbitkan Peraturan Menteri terkait yang menjadi dasar dalam pengelolaan DTK.

Buku ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan sedikit informasi mengenai DTK. Pada Bab I buku ini berisi Pendahuluan, yang memuat Definisi, Konsep dan Tujuan, maupun Dasar Hukum DTK. Bab II membahas tentang Perkembangan

Kebijakan DTK . Bab III membahas Arah Kebijakan DTK. Bab IV membahas tentang DAK Fisik. Bab V membahas tentang DAK Non Fisik. Bab VI tentang DTK pada APBN di Masa Pandemi Covid-19. Sedangkan Bab VII membahas tentang Studi Kasus DTK.

Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan agar lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Dan terakhir, besar harapan kami semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, November 2020

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.